

Selesaikan Masalah Kesehatan Masyarakat, Wagub NTB : Posyandu Keluarga Kuncinya



<https://www.nusabali.com/>

INAnews.co.id, Mataram – Progres perkembangan jumlah posyandu keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat setiap bulannya. Hal tersebut membuktikan bahwa program unggulan revitalisasi posyandu dalam visi NTB Gemilang pelan namun pasti akan segera terwujud. Selama 6 bulan terakhir (periode Juli 2019 s/d Juni 2020) telah terbentuk 454 posyandu keluarga. Sehingga total jumlah posyandu keluarga per Juni 2020 sebanyak 1.514 dari 7.379 posyandu se-NTB.

Merujuk hal tersebut, Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan dalam mewujudkan revitalisasi posyandu. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam rangka mengekspos progress program unggulan, Jum'at 3 Juli 2020. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Lalu Gita Ariadi dan Asisten 1 Setda Baiq Eva Nurcahyaningih, M.Si.

Ummi Rohmi memaparkan, jika posyandu keluarga telah berjalan aktif maka banyak pekerjaan rumah masalah kesehatan masyarakat seperti pandemi covid 19, stunting, permasalahan keamanan pangan, kematian ibu dan anak, dan permasalahan kesehatan masyarakat lainnya bisa terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan seringkali sumber masalah disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut.

“Jika posyandu keluarga sudah jalan aktif dan bagus selesai banyak PR kita. Karena edukasi jalan trus sehingga mindset masyarakat bisa terbangun. Banyak permasalahan kesehatan masyarakat kita belum terselesaikan bukan karena tidak mampu tapi karna ketidaktahuan dan ketidaktahuan,” jelas alumni Universitas Indonesia tersebut.

Untuk mengaktifkan posyandu secara maksimal, Ummi Rohmi berpesan untuk terus meningkatkan kemampuan para kader posyandu. Karena melalui kader yang baik maka posyandu dapat berjalan dengan baik juga. Jika memiliki kader yang kompeten maka masyarakat akan senang hati ke posyandu tanpa merasa terpaksa. Selain terus mengupgrade kemampuan kader posyandu kembali mengingatkan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan para kader.

“Minimal insentif kader 150 ribu sebulan, supaya kader kita merasa termotivasi untuk terus belajar dan mengedukasi masyarakat,” pesan Ummi Rohmi.

Lebih jauh Ummi Rohmi memaparkan, dalam masa pandemi covid-19 menjadi masa-masa yang berat bagi Dinas Kesehatan. Namun dengan perencanaan program yang matang, sinergi yg baik, serta evaluasi yang tepat Dinas Kesehatan pasti mampu mengemban segala tugas dan menyelesaikan program-programnya dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nurhandini Eka Dewi dalam persentasinya memaparkan beberapa hambatan yang dihadapi posyandu saat pandemi covid-19. Diantaranya, Posyandu tidak terlaksana di bulan April-Mei 2020 di semua Kab/Kota diakrenakan pembatasan sosial selama masa covid-19. Update data triwulan II belum dapat dilaksanakan karena hampir semua petugas Puskesmas melaksanakan Tracing kontak pasien Covid-19. Serta, beberapa Kegiatan tidak terlaksana (Reward kader, pengadaan Dacin, Evaluasi kegiatan, dan media KIE Posyandu.

Namun beberapa strategi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya, beberapa Kabupaten melaksanakan kegiatan Posyandu dengan kunjungan rumah oleh kader. Dikes Provinsi menyurati Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk mulai melaksanakan Posyandu dengan Protokol Covid-19 di awal juni 2020. Menyusun SOP Posyandu pada masa Pandemi Covid-19. Mengalihkan beberapa kegiatan Promkes dari dana BOK menjadi kegiatan Posyandu. Menyebarkan berbagai tutorial terkait pelaksanaan Posyandu di masa Pandemi Covid-19. Serta, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kab/kota.

Sumber Berita:

1. <https://www.inanews.co.id/2020/07/selesaikan-masalah-kesehatan-masyarakat-wagub-ntb-posyandu-keluarga-kuncinya/>
2. <https://www.suarabumigora.com/2020/07/revitalisasi-posyandu-terus-meningkat.html>
3. <https://dutaselaparang.com/ummi-rohmi-apresiasi-kabupaten-kota-yang-berikan-perhatian-lebih-terhadap-posyandu/>

Catatan:

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Permenkes 39/2016), disebutkan bahwa Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;

- b. mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota; melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
- c. mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Permenkes 39/2016 disebutkan bahwa Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting);
- c. penanggulangan penyakit menular; dan
- d. penanggulangan penyakit tidak menular.

Penjelasan secara teknis mengenai Prioritas Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 dijelaskan dalam Lampiran I Permenkes 39/2016 BAB II, yang menyatakan bahwa salah satu Penetapan area prioritas Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dalam fokus huruf c) Balita, yaitu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Melakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Memperkuat kelembagaan Pokjanal Posyandu.
- (3) Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA.
- (4) Memperkuat kader Posyandu.

Sedangkan pedoman dalam Pengintegrasian Posyandu telah diatur sebelumnya dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Permendagri 19/2011). Dalam Pasal 1 angka 1 pengertian Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Permendagri 19/2011 dinyatakan bahwa Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu. Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah dan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Kegiatan-kegiatan Posyandu meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.